

**BUDGET CONTROL
FOREIGN DEVELOPMENT OF EAST KALIMANTAN PROVINCE**

Oleh : **Heriyanto dan Damianus Rudiansyah**

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

=====

ABSTRACT

Criteria that are important to determine the ability of agencies in managing households in the agency can be seen from its financial position. The financial position can be seen from the Budget Realization Report (LRA) that determines the amount of agency expenditure to finance all activities in each budget year. The purpose of this research is to know the Control of Budget of Forestry Service of East Kalimantan Province in 2016.

Based on the results of analysis and discussion on research, then the conclusion Based on the results of analysis and discussion on research, the conclusions obtained are as follows:

- 1. Viewed Ratio of Growth Spending Budget Control of East Kalimantan Provincial Forestry Office 2016 Efficiency due to Expenditure in 2016 has increased.*
- 2. Viewed Operating Expenditure Ratio Against Total Expenditure Budget Control of East Kalimantan Provincial Forestry Office 2016 Efficiency due to Actual Expenditure of Operations in 2016 decreased.*
- 3. Capital Expenditure Ratio to Total Expenditure Budget Control of East Kalimantan Provincial Forestry Office 2016 Efficiency due to Actual Expenditure of Operations in 2016 decreased.*
- 4. Direct Ratio of Direct Expenditure and Indirect Expenditure Budget Control of East Kalimantan Provincial Forestry Office 2016 Unstable due to Expenditure of Operations Expenditure in 2016 has increased.*
- 5. Viewed Ratio of Efficiency of Expenditure Budget Control of East Kalimantan Provincial Forestry Office 2016 Enough Efficiency due to Realization of Expenditure in 2016 less than Budget.*

Based on the above conclusions of the East Kalimantan Provincial Forestry Service's Budget Control. It is reviewed from the Growth Ratio of Expenditure, the Ratio of Expenditure on Total Expenditure, the Ratio of Capital Expenditure to Total Expenditure, the Ratio of Direct Expenditure and Indirect Expenditure, the Efficient Easier Expense Ratio of 2016, Accepted

Keywords : Budget, Control

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kalimantan Timur dengan luas daratan 21 juta hektar memiliki kawasan hutan seluas 14,65 juta hektar. Dimana hampir sebagaimana besar luasnya merupakan hutan produksi yang dikelola oleh pengusaha hutan dan sekitar 1,2 juta hektar merupakan hutan tanaman industri yang realisasi penanamannya masih di bawah 20% (Dishut 2013). Luas hutan yang sekarang dikuasai lebih pengusaha tersebut masih belum termasuk dalam kawasan hutan yang dikelola oleh pengusaha yang memperoleh ijin dari pemerintah.

Ada tiga masalah besar di Kalimantan Timur saat ini dalam hal pengembangan kehutanan yang juga tidak kalah pentingnya harus mendapat perhatian serius oleh semua pihak, yaitu yang pertama *bad governance and dirty governance* (pemerintah yang buruk dan pemerintah yang kotor), dan yang kedua *disparity* (ketimpangan, kesenjangan, kecemburuan), dan yang ketiga *sprawl* (pemekaran, perluasan) yang merupakan masalah-masalah serius yang harus diatasi untuk mempertahankan kelestarian hutan (Dishut 2013). Saat ini banyak terjadi (setelah otonomi daerah), para Bupati dan Wali Kota hanya memikirkan daerahnya masing-masing. Seperti contoh, masing-masing ingin meningkatkan pendapatan asli daerahnya (PAD) untuk memacu perekonomian daerahnya tanpa harus memperhatikan konsevasi dan kelestarian dari hutan itu sendiri.

Tekanan terhadap sumber daya hutan yang diakibatkan oleh *over cutting, illegal logging*, perambahan yang disertai okupasi lahan, terutama pada era revormasi dan otonomi daerah sangat dirasakan pada saat ini. Kondisi hutan yang menurun juga telah terjadi sebagai akibat adanya kebakaran hutan dalam beberapa tahun terakhir ini. Kebijakan dalam kegiatan rehabilitas hutan dan lahan pada kawasan hutan kinservasi, hutan lindung, maupun hutan produksi. Kurangnya perhatian kebijakan dalam kegiatan pelestarian dan perlindungan keanekaragaman jenis flora, baik terhadap jenis kayu unggulan untuk perdagangan maupun terhadap berbagai jenis flora langka.

Kriteria yang penting untuk mengetahui kemampuan instansi dalam mengatur rumah tangga di instansi itu dapat dilihat dari posisi keuangannya. Posisi keuangan dapat dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang menentukan besarnya pengeluaran instansi untuk membiayai semua kegiatan dalam setiap tahun anggaran. Berikut ini disajikan mengenai total anggaran belanja Dinas Kehutanan Provins Kalimantan Timur dari tahun 2009-2013.

Tabel 1 Perkembangan Belanja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur (dalam rupiah)

No	Tahun	Belanja Dinas Kehutanan
1	2009	43.481.307.711,00
2	2010	44.706.732.729,00
3	2011	51.175.506.000,00
4	2012	52.905.282.270,00
5	2013	51.642.185.000,00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dishut Kalimantan Timur 2016

Berdasarkan pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun selama periode 2010 hingga 2013 terjadi peningkatan jumlah belanja pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini menjelaskan bahwa kegiatan pembangunan dalam kehutanan yang selalu meningkat tiap tahunnya. Karena apabila terjadi penurunan dalam jumlah belanja tiap tahun, maka menandakan bahwa pemerosotan pemerintah dalam menangani kegiatan dalam pembangunan Kehutan di Kalimantan Timur.

Dalam Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam suatu periode pelaporan. Tujuan utama dalam pelaporan realisasi anggaran

adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran secara tersanding. Penyandingan antara Anggaran dengan Realisasi menunjukkan tingkat pencapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai peraturan perundang-undangan. Laporan realisasi anggaran terdiri atas beberapa elemen, yaitu: pendapatan, transfer, belanja, surplus atau deficit, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pembiayaan netto, dan Sisa Lebih Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiPKA).

Belanja dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan social, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak berduga. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Laporan realisasi anggaran merupakan jenis laporan keuangan daerah yang lebih dahulu dihasilkan sebelum kemudian diisyaratkan untuk membuat laporan neraca dan laporan arus kas. Anggaran dalam pemerintahan merupakan tulang punggung penyelenggaraan pemerintahan. Anggaran memiliki peran penting sebagai alat stabilisasi, distribusi, alokasi sumber daya public, perencanaan dan pengendalian organisasi serta penilaian kinerja. Oleh karena itu laporan realisasi anggaran menjadi salah satu laporan pertanggungjawaban keuangan yang utama pada instansi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

"Apakah Pengendalian Anggaran tahun 2015 terhadap Realisasi Anggaran pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur telah Efisien "

C. Tujuan Penelitian

II. KERANGKA DASAR TEORI

A. Akuntansi Sektor Publik

1. Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Istilah sektor publik memiliki pengertian yang bermacam-macam, hal ini merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah publik, sejalan dengan perkembangannya maka di negara kita.

Menurut Menurut Indra Bastian (2007:15) akuntansi sektor publik dapat didefinisikan sebagai :

Mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan department dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta.

Pemerintah menegakkan keadilan dan hasil kinerjanya harus berorientasi pada masyarakat untuk mengatur, menertibkan, dan mensejahterakan masyarakat. Dapat didefinisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk pelaporan hasil-hasilnya dalam penyelenggaraan urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

Dapat disimpulkan bahwa tujuan akuntansi pada pemerintahan adalah memberikan informasi yang diperlukan agar dapat mengelola suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi secara tepat, efisien, dan ekonomis, serta memberikan informasi untuk melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan tersebut serta melaporkan hasil operasi dan penggunaan dana publik. Selain itu, akuntansi pemerintahan mengacu pada penerapan teori, prinsip atau standar akuntansi pada organisasi yang tidak mencari laba, khususnya unit organisasi pemerintahan.

Akuntansi sektor publik dapat diartikan sebagai suatu kegiatan jasa yang aktifitasnya berhubungan dengan usaha, terutama yang bersifat keuangan guna pengambilan keputusan untuk menyediakan kebutuhan dan hak publik melalui layanan publik yang diselenggarakan oleh entitas pemerintah.

2. Tujuan Akuntansi Sektor Publik

Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien dan ekonomis atas alokasi suatu sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab secara tetap dan efektif program dan penggunaan sumberdaya yang menjadi wewenang dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik dan tujuan ini terkait dengan akuntabilitas.

Menurut Deddi Nordiawan (2006:7) akuntansi pemerintahan mempunyai beberapa tujuan yaitu :

1. Tujuan pertanggungjawaban
2. Tujuan manajerial
3. Tujuan pengawasan

Tujuan Akuntansi Sektor Publik adalah memberikan informasi yang diperlukan untuk melakukan tindakan atau keputusan secara efisien yang dikelola oleh organisasi yang dapat dipercaya serta pelaporan yang dapat dipertanggung jawabkan

3. Anggaran Sektor Publik

Anggaran sektor publik menurut Mardiasmo (2006:62) "suatu rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam suatu moneter".

Anggaran sektor publik merupakan rincian seluruh aspek kegiatan yang akan dilaksanakan yang tersusun atas rencana pendapatan dan pengeluaran yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun. Anggaran sektor publik dibuat untuk membantu pemerintah dalam tingkat pertumbuhan masyarakat seperti: listrik, air bersih, kualitas kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.

Menurut Mardiasmo (2006:63) juga mengemukakan anggaran sektor publik penting karena beberapa alasan sebagai berikut:

1. Anggaran merupakan alat pemerintah untuk mengarahkan pembangunan social ekonomi, menjalin kesiambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
2. Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang. sedangkan sumber daya yang ada terbatas.
3. Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap masyarakat.

Melalui proses penyusunan anggaran dapat membantu pemerintah dalam meresliasikan seluruh rencana keuangannya baik itu perencanaan penerimaan maupun rencana

pengeluarannya sehingga dapat terkontrol dan terkoordinasi sehingga tidak terjadi pemborosan di setiap unit.

Anggaran sebagai alat perencanaan kegiatan publik yang dinyatakan dalam satuan moneter sekaligus digunakan sebagai alat pengendalian. Agar fungsi perencanaan dan pengawasan dapat berjalan dengan baik maka sistem anggaran serta pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran harus dilakukan dengan cermat dan sistematis.

Sebagai seluruh sistem perencanaan anggaran sektor publik telah mengalami banyak perkembangan. Sistem perencanaan anggaran sektor publik telah mengalami banyak perkembangan manajemen sektor publik dan pengembangan tuntutan yang muncul dimasyarakat.

1. Laporan Keuangan Daerah

a. Pengertian Akuntansi Keuangan Daerah

Akuntansi keuangan daerah merupakan bagian dari akuntansi pemerintah atau lebih sering disebut akuntansi sektor publik.

Menurut Mardiasmo(2002:141) "Akuntansi sektor publik sangat erat kaitannya dengan fungsi akuntansi sebagai penyedia informasi keuangan untuk pihak eksternal organisasi"

Sedangkan akuntansi sektor publik menurut Bastian (2006:15)

Akuntansi pada pengelolaan dana masyarakat dilembaga-lembaga tinggi Negara dan departemen-departemen dibawahnya seperti: PEMDA, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan social, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor public.

Sedangkan Menurut Halim (2008:34), menjelaskan akuntansi sektor publik adalah sebagai berikut:

Akuntansi yang datanya digunakan untuk memberikan informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan pemerintah kepada pihak eksekutif, legeslatif, yudikatif dan masyarakat

Berdasarkan beberapa pendapat yang dikemukakan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntansi sektor publik merupakan suatu rangkaian proses yang hampir sama dengan akuntansi pada umumnya, hanya saja tuntutan akuntabilitas dan transparansi kepada publik sangat ditekankan pada pelaporannya.

b. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran adalah menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan menyajikan laporan secara komperatif.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD dengan menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah dalam satu periode pelaporan. LRA menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

2. Pengendalian

a. Pengertian Pengendalian

Pengendalian merupakan usaha sistematis perusahaan untuk mencapai tujuan dengan cara membandingkan prestasi kerja dengan rencana dan membuat tindakan yang tepat untuk mengoreksi perbedaan yang penting.

Manajer mencermati laporan akuntansi dan laporan lainnya, dan kemudian membandingkan dengan rencana yang sudah disusun sebelumnya. Laporan akuntansi dan laporan lainnya yang masuk ke manajemen disebut umpan balik

Menurut Simamora (2002:6):

Fungsi pengendalian (*controlling*) merupakan proses memastikan bahwa hasil sesuai dengan rencana semula. Dalam rangka menyelenggarakan fungsi pengendalian, manajer mengambil langkah penting dalam rangka memastikan bahwa setiap organisasi mengikuti rencana yang telah digariskan pada tahap perencanaan.

Umpan balik adalah informasi yang dapat dipakai untuk mengevaluasi atau mengoreksi tahapan yang diambil untuk menerapkan sebuah rencana dengan umpan balik, seorang manajer (atau karyawan) dapat mengambil tindakan seperlunya. Umpan balik yang diterima oleh manajemen bisa saja mengindikasikan adanya kebutuhan untuk merevisi rencana, menyusun strategi baru atau menata ulang struktur organisasi.

b. Fungsi Anggaran Sebagai Alat Pengendalian

Sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada public. Tanpa anggaran, pemerintah tidak dapat mengendalikan pemborosan-pemborosan pengeluaran.

Anggaran sebagai instrument pengendalian digunakan untuk menghindari adanya *overspending*, *underspending* dan salah sasaran (*misappropriation*) dalam pengalokasian anggaran pada bidang lain yang bukan merupakan prioritas.

Anggaran merupakan alat untuk memonitor kondisi keuangan dan pelaksanaan operasinya program atau kegiatan pemerintah. Sebagai alat pengendalian manajerial, anggaran sektor public digunakan untuk menyakinkan bahwa pemerintah masih mempunyai cukup uang untuk memenuhi kewajibannya, selain itu juga digunakan sebagai pemberi informasi dan meyakinkan legislatif bahwa pemerintah bekerja secara efisien tanpa ada korupsi dan pemborosan.

Sebagai alat pengendalian anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada public. Tanpa anggaran pemerintah tidak dapat mengendalikan pemborosan pengeluaran. Anggaran sektor publik dapat digunakan untuk mengendalikan kekuasaan eksekutif.

Menurut Mardiasmo (2002:150) pendalian anggaran publik dapat dilakukan melalui empat cara, yaitu:

1. membandingkan kinerja actual dengan kinerja yang dianggarkan
2. menghitung selisih anggaran (*favourable* dan *unfavourable variances*)
3. Menemukan penyebab yang dapat dikendalikan (*controllable*) dan tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) atas suatu varians
4. Merevisi standar biaya atau target anggaran untuk tahun berikutnya

c. Anggaran Sebagai Alat Pengendalian

Setiap organisasi ingin mencapai tujuan dengan mengguankan sumber daya dalam organisasi secara efektif dan efisien. Setelah melakukan perencanaan atas kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuannya, organisasi juga harus melakukan pengendalian yang akan dilakukan untuk mencapai tujuannya, pemerintahan juga harus melakukan pengendalian atas kegiatan-kegiatan tersebut. Karena berhasil tidaknya kegiatan perencanaan kerja tergantung kepada efektifitas pengendalian yang dilakukan oleh organisasi.

Anggaran merupakan alat pengawasan atau pengendalian (*controlling*). Nafarin (2007:30). Pengendalian berarti mengevaluasi (menilai) terhadap pelaksanaan pekerjaan, dengan cara:

- a. Penyimpangan kelebihan dana, yaitu suatu kegiatan yang dalam pelaksanaannya realisasi kegiatan hanya membutuhkan dana lebih kecil dari anggaran yang ditetapkan.

- b. Penyimpangan kekurangan dana, yaitu suatu kegiatan yang dalam pelaksanaannya realisasi kegiatan hanya membutuhkan dana lebih besar dari anggaran yang ditetapkan.
- c. Membandingkan realisasi dengan rencana.(anggaran).
- d. Melakukan tindakan perbaikan bila dipandang perlu atau apabila terdapat penyimpangan merugikan

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan anggaran belanja sebagai variable indenpenden. Rumusan masalah dalam buku Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Mahmudi:2009) sebagai berikut:

1. Rasio Pertumbuhan Belanja

Analisis pertumbuhan belanja dilakukan untuk mengetahui berapa besar pertumbuhan masing-masing belanja, apakah pertumbuhan tersebut rasional dan dapat di pertanggungjawabkan.

Realisasi Belanja Thnt merupakan jumlah total belanja pada tahun berjalan sedangkan Realisasi Belanja Thnt-1 tahun sebelumnya.

Rumus yang digunakan sebagai berikut Mahmudi (2009:160):

$$\text{Pertumbuhan Belanja Thn } t = \frac{\text{Realisasi Belanja Thn}_t - \text{Realisasi Belanja Thn}_{t-1}}{\text{Realisasi Belanja Thn}_{t-1}}$$

2. Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja

Rasio ini menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai porsi belanja pemerintah yang dialokasikan untuk belanja operasi.

Realisasi Belanja Operasi merupakan hasil penjumlahan dari berbagai item belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah dan bantuan sosial sedangkan Total Belanja Daerah merupakan total jumlah belanja daerah selama tahun berjalan.

Rasio belanja operasi terdapat total belanja dirumuskan sebagai berikut Mahmudi (2009:164):

$$\text{Rasio Belanja Operasi Thd Total Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja}}$$

3. Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja

Berdasarkan rasio ini pembaca laporan dapat mengetahui porsi belanja pemerintah yang dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal.

Realisasi Belanja Modal merupakan jumlah terhadap belanja tanah, belanja peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya dan Belanja Aset Lainnya sedangkan Total Belanja Daerah merupakan total jumlah belanja daerah selama tahun ini.

Rasio belanja modal terdapat total belanja dirumuskan sebagai berikut Mahmudi (2009:164):

$$\text{Rasio Belanja Modal Thd Total Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}}$$

4. Rasio Belanja Langsung dan Tidak Langsung

Rasio proposal belanja langsung dan tidak langsung bermanfaat untuk kepentingan manajemen internal pemerintah daerah, yaitu untuk pengendalian biaya dan pengendalian anggaran. Belanja langsung dan tidak langsung biasanya tidak menjadi bagian dari laporan keuangan external, namun informasi tersebut sangat penting bagi manajemen internal.

Rasio Belanja Langsung dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Langsung} = \frac{\text{Total Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja}}$$

Sementara itu, Rasio Belanja Tidak Langsung dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Tidak Langsung} = \frac{\text{Total Belanja Tdk Langsung}}{\text{Total Belanja}}$$

5. Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah.

Realisasi Belanja merupakan penjumlahan belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan transfer pada tahun yang berjalan sedangkan Anggaran Belanja merupakan yang dilakukan pada tahun sebelumnya

Rasio ini menggunakan rumus Mahmudi (2009:166):

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100 \%$$

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Analisis

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur telah Efisien terhadap Laporan Relasasi Anggaran tahun 2014 dan 2015 untuk itu perlu dilakukan perhitungan dengan menggunakan data pada bab IV yaitu berupa Laporan Realisasi Anggaran tahun 2014 dan 2015

Efisien terhadap Laporan Relasasi Anggaran dapat dilihat dari perhitungan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2015 sebagai berikut:

1. Rasio Pertumbuhan Belanja

Analisis pertumbuhan belanja dilakukan untuk mengetahui berapa besar pertumbuhan masing-masing belanja, pertumbuhan tersebut rasional dan dapat di pertanggungjawabkan. Realisasi Belanja Thnt merupakan jumlah total belanja pada tahun berjalan sedangkan Realisasi Belanja Thnt-1 tahun sebelumnya.

Rumus yang digunakan sebagai berikut Mahmudi (2009:160):

$$\text{Pertumbhn Belanja Thn } t = \frac{\text{Realisasi Belanja Thn}_t - \text{Realisasi Belanja Thn}_{t-1}}{\text{Realisasi Belanja Thn}_{t-1}} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Belanja Thn 2015} = \frac{\text{Rp } 66.635.158.060,00 - \text{Rp } 64.920.308.178,00}{\text{Rp } 64.920.308.178,00} \times 100\%$$

$$= \text{Rp } 0,0264 \text{ atau } 2,64$$

2. Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja

Rasio ini menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai porsi belanja pemerintah yang dialokasikan untuk belanja operasi.

Rasio belanja operasi terhadap total belanja dirumuskan sebagai berikut Mahmudi (2009:164):

$$\text{Rasio Belanja Operasi Thd Total Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Rasio Belanja Operasi Thd Total Belanja 2015} &= \frac{\text{Rp } 53.521.909.190,00}{\text{Rp } 66.635.158.060,00} \times 100\% \\ &= \text{Rp } 0,80 \text{ atau } 80\% \end{aligned}$$

3. Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja

Berdasarkan rasio ini pembaca laporan dapat mengetahui porsi belanja pemerintah yang dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal.

Rasio belanja modal terhadap total belanja dirumuskan sebagai berikut Mahmudi (2009:164):

$$\text{Rasio Belanja Modal Thd Total Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Rasio Belanja Modal Thd Total Belanja 2015} &= \frac{\text{Rp } 13.113.248.870,00}{\text{Rp } 66.635.158.060,00} \times 100\% \\ &= 0.20 \text{ atau } 20\% \end{aligned}$$

4. Rasio Belanja Langsung & Tidak Langsung

Belanja langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan kegiatan (aktivitas), sedangkan belanja tidak langsung merupakan pengeluaran belanja yang tidak terkait dengan pelaksanaan kegiatan secara langsung Mahmudi (2009:165).

Rasio Belanja Langsung dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Langsung} = \frac{\text{Total Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp } 32.388.026.000,00}{\text{Rp } 85.642.185.000,00} \times 100\%$$

$$= 0.38 \text{ atau } 38\%$$

Sementara itu, Rasio Belanja Tidak Langsung dirumuskan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Rasio Belanja Tidak Langsung} &= \frac{\text{Total Belanja Tdk Langsung}}{\text{Total Belanja}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Rp } 53.254.159.000.00}{\text{Rp } 85.642.185.000.00} \times 100\% \\
 &= 0.62 \text{ atau } 62\%
 \end{aligned}$$

V. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada penelitian, maka kesimpulan yang didapat adalah sebagai berikut:

1. Dilihat Rasio Pertumbuhan Belanja Pengendalian Anggaran Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 Efisiensi karena Realisasi Belanja Tahun 2015 mengalami peningkatan.
2. Dilihat Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja Pengendalian Anggaran Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 Efisiensi karena Realisasi Belanja Operasi Tahun 2015 mengalami penurunan.
3. Dilihat Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Pengendalian Anggaran Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 Efisiensi karena Realisasi Belanja Operasi Tahun 2015 mengalami peningkatan.
4. Dilihat Rasio Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Pengendalian Anggaran Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 Tidak Efisiensi karena Realisasi Belanja Operasi Tahun 2015 mengalami peningkatan.
5. Dilihat Rasio Efisiensi Belanja Pengendalian Anggaran Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 Cukup Efisiensi karena Realisasi Belanja pada Tahun 2015 kurang dari Anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2007. *"Audit Sektor Publik"*. Jakarta: Erlangga
- Halim, Abdul. 2008. *"Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah"*. Jakarta: Salemba Empat
- Mahmudi, 2009. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, UPP STIM. YKPN, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2006. *"Akuntansi Sektor Publik"*. Andi. Yogyakarta
- Nafarin, 2007. *"Penganggaran Perusahaan"*. Edisi Revisi. Salemba Empat, Jakarta
- Nordiawan, 2007, *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Indeks, Jakarta
- Simamora Yuwono, Sony, 2005, *Penganggaran Perusahaan*, Salemba Empat, Jakarta